



Peran Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat di MTS Al-Faaizun Watang Palakka

Siti Aisyah¹, Astuti², Yahya³

¹Mahasiswa Pascasarjana UIN Alauddin Makassar

Email: sitiaisyah110385@gmail.com

²Dosen IAIN Bone

Email : astutiabbas69@gmail.com

³Dosen IAIN Bone

Email : yahyam2810@gmail.com

Abstract. *This study describes the reality of SBM, community participation, and SBM's contribution to increasing community participation in MTs Al-Faaizun Watang Palakka sub-district Tanete Riattang Barat district Bone. This type of descriptive qualitative research through observation, interviews and documentation. Research subjects were the principal, teachers and school committee. Analyzed by data reduction methods, data presentation, drawing conclusions and verification. The results showed first, the implementation of SBM in flexibility, the teacher determined the learning and madrasa programs as needed. Decentralization of teaching activities, efficient problem solving, goal achievement strategies, and accountability. Independent in the management of human resources, facilities and infrastructure, as well as funds. Dimensions of HR initiatives in enhancing collaboration, tolerance and training. Second, community participation in decision making, namely the attendance of meetings reaching 70-80%, giving ideas, participating in the implementation of madrasa activities in the form of funds, energy, and material, as well as supervising and improving activities. All three SBM have contributed in increasing community participation in planning, implementing and evaluating educational programs so that the community participates in having a madrasa so as to strive to achieve educational goals.*

Keywords : *School Based Management, Community Participation.*

Abstrak. *Penelitian ini mendeskripsikan realitas MBS, partisipasi masyarakat, serta kontribusi MBS terhadap peningkatan partisipasi masyarakat di MTs Al-Faaizun Watang Palakka Kec. Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone. Jenis penelitian deskriptif kualitatif melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Subjek penelitian adalah kepala sekolah, guru dan komite sekolah. Dianalisis dengan metode reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan pertama, pelaksanaan MBS dalam fleksibilitas, guru menentukan pembelajaran dan program madrasah sesuai kebutuhan. Desentralisasi aktivitas pengajaran, pemecahan masalah efisien, strategi pencapaian tujuan, dan pertanggungjawaban. Mandiri dalam pengelolaan SDM, sarana dan prasarana, serta dana. Dimensi inisiatif SDM dalam peningkatan kerjasama, toleransi, dan pelatihan. Kedua, Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan yaitu kehadiran rapat mencapai 70-80 %, pemberian ide, ikut serta pelaksanaan kegiatan madrasah dalam bentuk dana, tenaga, dan materiil, serta melakukan pengawasan dan perbaikan kegiatan. Ketiga MBS telah berkontribusi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program pendidikan maka masyarakat ikut serta memiliki madrasah sehingga berupaya mencapai tujuan pendidikan.*

Kata Kunci : *Manajemen Berbasis Sekolah, Partisipasi Masyarakat.*

PENDAHULUAN

Pendidikan memegang peranan penting dalam peningkatan sumber daya manusia. Permasalahan pendidikan di Indonesia adalah rendahnya mutu pendidikan. Hal ini dapat dilihat dari beberapa lulusan SMA dan perguruan tinggi yang tidak bisa terserap dalam dunia kerja. Untuk meningkatkan mutu pendidikan yang ada, maka muncullah otonomi daerah yang diikuti dengan otonomi dalam bidang pendidikan. Model otonomi pendidikan yang dikembangkan adalah Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) atau *School Based Management* (Hasbullah, 2006: 66). *School Based Management* sebagai manajemen sekolah yang dilakukan secara otonom oleh warga sekolah dengan melibatkan peran serta secara aktif dari orang tua dan masyarakat (Sri Renani, 2008,122). Peran serta masyarakat yaitu kontribusi, sumbangan dan keikutsertaan masyarakat dalam menunjang mutu pendidikan. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan hal tersebut dalam pasal 56 ayat 1 sebagai berikut :

Masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah.

Peningkatan partisipasi adalah penciptaan lingkungan yang terbuka dan demokratis. Warga sekolah yang terdiri dari guru, swasta, karyawan dan masyarakat yaitu orang tua siswa, tokoh masyarakat, ilmuwan, usahawan, dan sebagainya terlibat secara langsung dalam penyelenggaraan pendidikan, mulai dari pengambilan keputusan, pelaksanaan, dan evaluasi pendidikan yang diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan (Rohiat, 2012:79). Masyarakat dalam kenyataannya memiliki pandangan bahwa, tanggung jawab pembangunan (dalam bidang pendidikan) hanya terletak di tangan pemerintah atau sekolah, menyebabkan masyarakat merasa hanya ditempatkan sebagai bukan pemain utama dan berakibat melemahkan kemauan berpartisipasi warga dan kelompok-kelompok masyarakat dalam pengembangan pendidikan (Muhammad Rifai, 2011:185). Sehingga partisipasi masyarakat di sekolah serta pemahaman mengenai bentuk partisipasi masyarakat di sekolah masih belum optimal. Terkait dengan itu Allah swt berfirman dalam QS. Ali Imran/3: 110.

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ... ﴿١١٠﴾

Terjemahnya : Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah... (Kementerian Agama RI, 2011: 64).

Dari isi kandungan ayat di atas maka dapat diketahui bahwa makna kata *ummah* adalah himpunan manusia yang seluruh anggotanya bersama-sama menuju satu arah yang sama, bahu membahu, dan bergerak secara dinamis di bawah kepemimpinan bersama. (Shihab, 2006:174). Al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam telah memberikan perhatian besar terhadap perlunya pembinaan masyarakat. (Abuddin Nata, 2010: 232) Oleh karena itu, masyarakat harus berpartisipasi dalam pendidikan guna untuk saling mengingatkan dalam kebaikan dan mencegah dalam kemungkaran, sehingga pendidikan dapat terlaksana sesuai dengan apa yang dicita-citakan.

Berdasarkan observasi awal bahwa MTs Al Faizun Watang Palakka Kec. Watang Palakka pernah menjadi salah satu madrasah yang memiliki mitra dengan USAID (*United States Agency for International Development*) atau kerjasama pemerintah Indonesia dengan pemerintah Amerika Serikat dalam bidang pendidikan, sehingga diperoleh bantuan dana dari Amerika Serikat. Madrasah ini juga pengembangan dari USAID PRIORITAS (*Prioritizing Reform, Innovation, and Opportunities Reaching Indonesia's Teachers, Administrator and Student*), yaitu sekolah dengan program pengutamaan pembaharuan, inovasi, dan kesempatan bagi guru, tenaga kependidikan dan siswa. Madrasah tersebut merupakan salah satu madrasah yang peran serta masyarakat masih perlu ditingkatkan. Pemahaman beberapa masyarakat bahwa partisipasi masyarakat hanya dalam bentuk

dana/uang, yang pada hakikatnya peran serta masyarakat bukan hanya dalam bentuk dana/uang, juga termasuk bentuk pengambilan keputusan (pemberian ide, pikiran, kurikulum, dan sumber belajar), pelaksanaan (tenaga), dan evaluasi program pendidikan.

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) adalah model manajemen yang berbasis otonomi atau kemandirian sekolah dan aparat daerah dalam menentukan arah, kebijakan, serta jalannya pendidikan (Hasbullah, 2006:66). MBS juga merupakan model pengelolaan pendidikan yang menjadikan sekolah sebagai poros pengambilan keputusan dan pemegang wewenang dalam pengambilan keputusan. Manajemen Berbasis Sekolah merupakan pemberian otonomi kepada sekolah untuk mengelolah, mengatur, melaksanakan, mengorganisasikan, dan mengawasi semua sumber daya yang ada di sekolah agar dapat digunakan secara maksimal, sehingga dapat mencapai tujuan yang telah direncanakan.

Manajemen Berbasis Sekolah bertujuan untuk memandirikan atau memberdayakan sekolah melalui pemberian kewenangan, fleksibilitas yang lebih besar untuk mengelola sumber daya sekolah, dan mendorong partisipasi warga sekolah dan masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah (Barlian, 2013: 8). Tujuan manajemen berbasis sekolah secara umum adalah agar sekolah mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman (analisis SWOT). Dengan analisis tersebut, sehingga sekolah dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi sekolah, yaitu melalui kerjasama antara warga sekolah dan masyarakat.

Barlian (2013: 9) menjelaskan tentang peraturan perundang-undangan yang terkait dengan MBS diantaranya, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional pasal 51 ayat 1, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah., Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional tahun 2000-2004, pada bab VII, dan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 tahun 2002 tentang Pembentukan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Nilai- Nilai yang terkandung dalam makna MBS (Danim, 2010: 83-86) diantaranya :

Tabel 1 Nilai- Nilai yang terkandung dalam makna MBS

Sing katan	Nilai	Sing katan	Nilai	Sing katan	Nilai
M	Manajemen	B	Berkelanjutan	S	Sistematik
A	Akuntabilitas	E	Egaliter	E	Elaboratif
N	Normatif	R	Relevan	K	Kontinyuasi
A	Akurat	B	Bermakna	O	Objektif
J	Jaringan- Masyarakat	A	Antisipatif	L	Luwes
E	Efektif	S	Sederhana	A	Akurat
M	Mumpuni	I	Insentif- Berprestasi	H	Hasil
E	Efesien	S	Sistemis		
N	Nilai-Nilai				

Nilai-nilai manajemen berbasis sekolah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Manajemen : pengelolaan dilakukan sesuai prosedur yaitu perencanaan, pengorganisasi, pelaksanaan dan pengawasan tentang sumber daya lembaga pendidikan.
2. Akuntabilitas : pertanggungjawaban bagi seluruh warga madrasah terhadap kegiatan di madrasah.
3. Normatif : segala kegiatan di madrasah haruslah berpedoman pada keijakan-kebijakan terkait.
4. Akurat : ketelitian, kecermatan dalam setiap keputusan dalam upaya kemajuan madrasah.

5. Jaringan-masyarakat : membangun jaringan antara madrasah dan masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat agar lulusan yang ada dapat diakomodasi dan senantiasa dibutuhkan masyarakat.
6. Efektif : tujuan yang direncanakan tercapai yang nantinya bermuara pada peningkatan mutu pendidikan.
7. Mumpuni : setiap warga madrasah memiliki kemampuan dalam implementasi rencana madrasah.
8. Efisien : sumber daya yang dimiliki madrasah yang masih terbatas dipergunakan semaksimal mungkin dalam pencapaian tujuan.
9. Nilai-nilai : implementasi MBS memiliki nilai sejati dalam penciptaan mutu pendidikan.
10. Berkelanjutan : MBS dalam implementasinya diharapkan secara kontinyu untuk mendapatkan hasil maksimal.
11. Egaliter : persamaan dalam menjalankan tupoksi masing-masing tanpa menghilangkan kerjasama tim.
12. Relevan : implementasi MBS senantiasa terkait dengan kebutuhan-kebutuhan stake holder baik kepala madrasah, tenaga pendidik dan kependidikan, peserta didik, orang tua, serta masyarakat secara umum.
13. Bermakna : implementasi MBS memiliki manfaat dalam meningkatkan hasil belajar siswa.
14. Antisipatif : mengantisipasi kelemahan-kelemahan madrasah serta masalah-masalah yang akan dihadapi ke depan sehingga kegagalan senantiasa diminimalkan.
15. Sederhana : implementasi MBS dilakukan dengan menyederhanakan struktur kerja dan alur kerja.
16. Intensif prestasi : pemberian penghargaan bagi semua warga madrasah yang memiliki prestasi.
17. Sistemis sebagai dasar proses kerja yang senantiasa teratur.
18. Sistematis sebagai proses secara menyeluruh manajemen madrasah.
19. Elaboratif dalam implementasi MBS senantiasa dilakukan secara tekun dan cermat dalam menggunakan potensi madrasah.
20. Kontinyuasi senantiasa menuntut kesabaran kepada warga madrasah dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing.
21. Objektif dalam implementasi MBS tanpa melibatkan masalah pribadi kepada organisasi, menilai sesuatu sesuai dengan fakta dan informasi yang ada.
22. Luwes sebagai penerimaan terhadap perubahan lingkungan sekitar sehingga senantiasa fleksibilitas terhadap perubahan.
23. Akurat dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran madrasah.
24. Hasil yang tercapai diukur sesuai dengan tolok ukur rencana yang telah ditetapkan.

Berbagai nilai implementasi MBS menjadi pedoman bagi kepala madrasah sebagai manajer dalam lembaga pendidikan islam secara khususnya. MBS dalam implementasinya tidak hanya dilakukan oleh kepala madrasah, namun hasil dari kerjasama berbagai kalangan baik kepala sekolah, tenaga pendidik dan kependidikan, siswa, orang tua siswa, serta masyarakat. Hal ini menjadi penting untuk diketahui sebagai upaya peningkatan percepatan peningkatan mutu madrasah. Adapun Prinsip Manajemen Berbasis Sekolah. Prinsip untuk mengelola sekolah dengan menggunakan MBS, yaitu prinsip ekuifinalitas, prinsip desentralisasi, prinsip sistem pengelolaan mandiri, dan prinsip inisiatif sumber daya manusia (Nurkholis, 2005).

1. Ekuifinalitas/Fleksibilitas

Hal ini berdasar pada teori manajemen modern bahwa terdapat cara yang berbeda-beda untuk mencapai suatu tujuan. Fleksibilitas sebagai keluwesan-keluwesannya yang diberikan kepada sekolah untuk mengelola, memanfaatkan, dan memberdayakan sumber daya sekolah seoptimal mungkin untuk meningkatkan mutu sekolah. Dengan adanya fleksibilitas, maka sekolah dikelola oleh

warga sekolah menurut kondisinya, misalnya aspek perbedaan tingkat akademik siswa dan situasi lingkungan sekolah, budaya, latar belakang dan lainnya. sehingga permasalahan yang dihadapi sekolah, harus dapat dipecahkan sekolah dengan cara yang paling tepat dan sesuai dengan situasi dan kondisinya. Walaupun sekolah yang berbeda memiliki masalah yang sama, cara penanganannya akan berlainan antara sekolah yang satu dengan yang lain. Dengan prinsip fleksibilitas ini, sekolah akan lebih responsif dan lebih cepat dalam menanggapi segala tantangan yang dihadapi, baik kewenangan untuk memilih, menentukan metode, alat dan sumber belajar yang efektif untuk mencapai tujuan maupun dalam konteks penyusunan program.

2. Desentralisasi

Pengelolaan sekolah dan aktivitas pengajaran tak dapat dielakkan dari kesulitan dan permasalahan adalah landasan prinsip desentralisasi. Dengan adanya desentralisasi maka sekolah akan tanggap untuk senantiasa bergerak, berkembang, dan bekerja menurut strategi-strategi unik dalam menjalankan dan mengelola sekolah secara efektif dan efisien. Tujuan prinsip desentralisasi adalah pemecahan masalah secara cepat, tepat dan efisien.

3. Prinsip Pengelolaan Mandiri

Pengelolaan mandiri/otonom dalam mengatur dan mengurus lembaga pendidikan. Tolok ukur utama kemandirian sekolah adalah kemandirian dalam program dan pendanaan. Otonomi sekolah adalah bukan memberikan semua kewenangan kepada sekolah untuk mengatur dan mengurus kepentingan warga, namun kemandirian tersebut tidak bersifat mutlak, absolut, atau semauanya. Kemandirian tersebut tetap harus bertolak pada ketentuan, peraturan. dan perundangan yang berlaku (Mulyasa, 2009: 36).

4. Prinsip Inisiatif Sumber Daya Manusia

Manusia bukanlah sumber daya yang statis, melainkan dinamis, sehingga potensi sumber daya manusia harus selalu digali, ditemukan, dan kemudian dikembangkan. Oleh karena itu, pelaksanaan MBS dalam lembaga pendidikan harus menggunakan pendekatan pengembangan sumber daya manusia (*human resources development*) agar sumber daya manusia senantiasa berinisiatif mengembangkan sekolah. Prinsip-prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) merupakan hal-hal yang harus diperhatikan atau menjadi asas/dasar berfikir di dalam pelaksanaan MBS diantaranya adalah prinsip fleksibilitas terhadap perubahan, prinsip desentralisasi kekuasaan dari pusat ke sekolah, prinsip kemandirian didalam pengelolaan madrasah, serta kerjasama antara warga sekolah, sehingga manajemen berbasis sekolah dapat terlaksana dengan baik.

5. Peningkatan Partisipasi Masyarakat

Peningkatan mutu melalui peningkatan partisipasi masyarakat dilandasi dengan keyakinan jika seseorang dilibatkan dalam pelaksanaan pendidikan, maka yang bersangkutan akan mempunyai "rasa memiliki" terhadap sekolah sehingga yang bersangkutan juga akan bertanggungjawab dan berdedikasi sepenuhnya untuk pencapaian tujuan sekolah. Dengan demikian, semakin besar tingkat partisipasi, semakin besar pula rasa memiliki, semakin besar pula rasa tanggung jawab, semakin besar pula dedikasinya. Tentu saja pelibatan warga sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah harus mempertimbangkan keahlian, batas kewenangan, dan relevansinya dengan tujuan partisipasi (Rohiat, 2012: 79).

Peran serta dalam mengambil keputusan yaitu sekolah mengundang rapat bersama komite sekolah untuk membahas perkembangan sekolah, masyarakat yang dalam hal ini orang tua, anggota komite sekolah, secara bersama-sama memberikan saran dan berakhir dengan pengambilan keputusan. Berdasarkan keputusan yang telah disepakati, maka keputusan tersebut tentunya akan dilaksanakan dalam menunjang pencapaian mutu pendidikan. Dengan demikian masyarakat yang mendukung program sekolah hasil kesepakatan telah berperan serta dalam pelaksanaan. Demikian pula dalam perjalanan program, tentunya perlu kontrol dan upaya-upaya untuk memperbaiki. Hal itu merupakan contoh peran serta masyarakat dalam mengevaluasi. (Syaifuddin, 2008: 4). Peran serta

masyarakat tersebut merupakan suatu kekuatan dan pengaruh dari Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program dalam bentuk dukungan masyarakat perlu dioptimalkan rencana pengembangan sekolah dirancang bersama oleh sekolah dan masyarakat, disampaikan secara terbuka, diperbaharui setiap tahun dan dilaksanakan. Peningkatan peran serta masyarakat dapat dilakukan dalam bentuk peningkatan kondisi lingkungan sekolah yang mendukung pembelajaran anak. Untuk itu, sekolah perlu membangun hubungan baik dengan masyarakat. Sekolah memiliki program-program yang perlu diperkenalkan kepada masyarakat, sekolah juga menerima kritik maupun saran dari masyarakat. Selain itu masyarakat dapat memantau dan menilai program-program sekolah agar tercipta akuntabilitas dan transparansi sekolah.

Partisipasi masyarakat dalam bentuk dukungan dan bantuan secara konkret dari masyarakat baik berupa tenaga, sarana maupun dana demi kelancaran tercapainya tujuan pendidikan, serta dengan adanya partisipasi masyarakat sehingga masyarakat dapat memecahkan permasalahan yang dihadapi sekolah. Masalah yang dipecahkan menyangkut siswa, guru, perlengkapan, keuangan dan perumusan tujuan penelitian (Sulistyorini, 2009: 152). Sehingga tercapainya tujuan yang telah direncanakan yang termuat dalam visi dan misi sekolah secara khusus, dan tujuan pendidikan nasional secara umum.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif untuk mendeskripsikan implementasi manajemen berbasis sekolah dalam peningkatan partisipasi masyarakat di MTs Al Faaizun Watang Palakka Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone. Menurut Sukmadinata (2005: 60) penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan sosiologis dan psikologis untuk membangun relasi atau hubungan dengan orang yang diteliti, agar memudahkan peneliti mendapatkan informasi terkait penelitian. Subjek penelitian adalah kepala sekolah, guru dan komite sekolah. Instrumen yang digunakan adalah pedoman observasi, pedoman wawancara dan pedoman dokumentasi. Data dianalisis dengan menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi (Sugiyono, 2011).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah di MTs AL Faaizun Watang Palakka Kec. Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Manajemen Berbasis Madrasah (MBS) di MTs Al Faaizun Watang Palakka telah berjalan dengan baik, dapat dilihat dari dimensi fleksibilitas, desentralisasi, kemadirian dan inisiatif sumber daya manusia. hal tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Prinsip fleksibilitas yaitu guru menentukan metode, sumber dan alat belajar sesuai kebutuhan siswa, serta program madrasah sesuai kebutuhan madrasah.

Dalam menentukan metode, alat dan sumber belajar sesuai dengan kebutuhan siswa, melalui metode mengajar yang berbeda yang disesuaikan dengan materi pelajaran, walaupun ada guru yang mengajar tidak sesuai dengan yang ada di RPP, karena menyesuaikan dengan kondisi siswa pada saat itu, sedangkan RPP disusun secara keseluruhan setahun sekali. Program-program yang ada di madrasah disesuaikan dengan skala prioritas atau kebutuhan madrasah, bukan melihat dari kepentingan madrasah. Hal ini sesuai dengan pendapat Syaifuddin (2008: 18) bahwa fleksibilitas dalam penggunaan metode pengajaran dan program madrasah.

2. Prinsip Desentralisasi dalam pengelolaan madrasah, aktivitas pengajaran, pemecahan masalah secepat mungkin, strategi pencapaian tujuan, dan pertanggungjawaban kepada pihak yang berwenang.

Prinsip desentralisasi diterapkan dalam pengelolaan aktivitas pengajaran adalah senantiasa menjalani proses pembelajaran dengan mengawalinya dengan motivasi dan menarik perhatian siswa untuk belajar, dan pelaksanaan proses pembelajaran sesuai dengan yang tercantum dalam RPP. Pemecahan masalah yang ada di madrasah secara umum diselesaikan melalui rapat bulanan yang dilaksanakan setiap bulannya guna untuk menyelesaikan masalah guru, proses pembelajaran dan lainnya yang bersifat urgen, sedangkan untuk masalah siswa diselesaikan tersendiri oleh guru di dalam kelas dengan metode yang berbeda, baik melalui pendekatan, melalui hukuman/sanksi, dan melalui kontrak belajar. Sebagaimana penjelasan dari Syaifuddin (2008: 18) bahwa desentralisasi kepada sekolah dalam pemecahan masalah secara cepat, tepat dan efektif.

Strategi pencapaian tujuan yang telah direncanakan adalah dibutuhkannya komitmen dalam pelaksanaannya serta harus disinkronkan dengan materi yang ada, sehingga tujuan yang telah direncanakan akan senantiasa tercapai. Pelaporan/pertanggungjawaban kepada pihak yang berwenang senantiasa dilakukan baik oleh kepala madrasah maupun guru-guru. Pertanggungjawaban tersebut dilakukan dalam bentuk rapat yang dilakukan di madrasah dan supervisi. Untuk pertanggungjawaban dalam bentuk supervisi adalah dalam bentuk RPP, walaupun dalam pelaksanaan RPP tersebut ada guru yang tidak terlalu memperhatikan langkah-langkah pembelajaran. Bentuk pertanggungjawaban lain adalah dalam bentuk fisik yaitu bundel, gambar-gambar dan dokumentasi lainnya.

3. Prinsip mandiri dalam pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta dana.

Pengelolaan sumber daya manusia telah dilaksanakan dengan baik yaitu membagi tugas sesuai dengan kemampuan guru, tugas dan tanggung jawab yang sama, serta pengelolaan sumber daya manusia (siswa) yang dibagi secara merata sehingga tidak ada kelas yang unggul dibandingkan kelas lainnya.

Untuk pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan yang perlu diperhatikan yaitu mulai dari perencanaan pengadaan barang sesuai kebutuhan madrasah, penyimpanan, pemeliharaan dan perbaikan sarana dan prasarana. Dalam pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan yang terpenting dan paling utama adalah pemeliharaan, yaitu kegiatan untuk mengurus semua sarpras yang ada agar sarana dan prasarana selalu dalam keadaan baik ketika ingin digunakan.

Pengelolaan sumber dana yang ada di madrasah, secara umum di kelola oleh bendahara madrasah untuk dana yang berasal dari pemerintah. Namun dana yang diperoleh dari bantuan masyarakat melalui komite madrasah, dikelola tersendiri oleh pengurus komite madrasah yang terdiri atas orang tua masyarakat, guru, tokoh masyarakat, tokoh agama dan pemilik yayasan. Pengelolaan keuangan yang ada dengan memerhatikan prinsip transparansi atau keterbukaan kepada semua pihak dan prinsip akuntabilitas/pertanggungjawaban kepada yang berhak. Pengelolaan secara mandiri tersebut senada yang dikemukakan oleh Syaifuddin (2008: 12), dan Mulyasa (2009: 36) bahwa pengelolaan sumber daya yang dilakukan oleh sekolah baik sumber daya manusia, sarana dan prasarana, keuangan, kurikulum dan lainnya.

4. Prinsip Inisiatif Sumber Daya Manusia

Bentuk kerjasama sumber daya manusia yang ada masih perlu ditingkatkan hal ini diakibatkan oleh banyaknya faktor, terutama faktor dari diri pribadi masing-masing. Setiap orang memiliki karakter yang berbeda-beda oleh karena itu bentuk kerjasama dapat ditingkatkan dengan melakukan pendekatan serta pemahaman kepada sumber daya manusia yang ada tentang pentingnya kerjasama. Sumber daya manusia yang ada masih memiliki perbedaan pendapat antara yang satu dengan lainnya karena perbedaan karakter, akan tetapi perbedaan pendapat yang ada senantiasa dapat disatukan dan dapat diselesaikan melalui musyawarah.

Pelatihan-pelatihan sering dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan sumber daya manusia yang ada. Pelatihan-pelatihan yang dilakukan misalnya seminar, *workshop* dan MGMP setiap mata pelajaran. Pelatihan-pelatihan dilakukan oleh pihak luar madrasah atau lembaga-lembaga pelatihan, dengan adanya kerjasama dengan pihak lain untuk menyelenggarakan pelatihan di madrasah. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Syaifuddin (2008:12) bahwa sumber daya manusia harus senantiasa dikembangkan dalam upaya peningkatan madrasah mencapai tujuan yang diinginkan.

B. Implementasi Partisipasi Masyarakat di MTs AL Faaizun Watang Palakka Kec. Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa di MTs Al Faaizun Watang Palakka, masyarakat telah berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan, maupun penilaian kegiatan di madrasah, diantaranya :

1. Pengambilan Keputusan

Dalam pengambilan keputusan dapat dilihat dari keikutsertaan masyarakat dalam rapat mencapai 70-80% berdasarkan dokumen daftar hadir rapat (Dokumentasi Madrasah), serta pemberian ide/pendapat. Masyarakat juga ikut serta dalam pelaksanaan kegiatan seperti kegiatan perayaan hari nasional dan keagamaan serta pentas seni, ikut serta melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan, serta bentuk partisipasi masyarakat dalam bentuk dana, tenaga, dan materil. Masyarakat juga ikut serta dalam pengawasan dan perbaikan kegiatan yang ada di madrasah sudah baik, Masyarakat juga ikut serta dalam rapat, dialog/diskusi yang di fasilitasi oleh komite di dalam menampung aspirasi masyarakat untuk kemajuan madrasah. Pelaksanaan rapat yang sebelumnya direncanakan sekali dalam sebulan hanya terlaksana dalam sekali satu semester, hal ini dikarenakan karena adanya kesibukan masing-masing dari pengurus komite. Masyarakat masih perlunya ditingkatkan keikutsertaan masyarakat di dalam mengambil keputusan dalam bentuk ide/gagasan, dan keikutsertaan masyarakat untuk mengikuti rapat juga masih kurang dilihat dari jumlah keikutsertaan untuk mengikuti rapat.

2. Pelaksanaan

Masyarakat senantiasa menerima keputusan yang ada dan pelaksanaan keputusan bersama yang telah diambil belum maksimal, karena terkadang ada keputusan yang telah diambil, akan tetapi banyak kendala-kendala yang dihadapi, baik kendala yang berasal dari madrasah maupun dari masyarakat itu sendiri.

Adapun bentuk partisipasi masyarakat bukan hanya dalam bentuk dana/uang akan tetapi juga dalam bentuk tenaga maupun bentuk partisipasi yang lainnya, sebagaimana yang dikemukakan oleh Mukhtar dan Iskandar (2009:204-205). Masyarakat juga ikut serta dalam kegiatan madrasah, akan tetapi tidak semua kegiatan madrasah, untuk kegiatan bakti sosial belum dilibatkan dan hanya bakti sosial oleh siswa dan warga madrasah, sedangkan untuk kegiatan peringatan hari besar nasional, keagamaan, dan pentas seni sudah ikut serta dalam memenuhi kebutuhan anaknya dan keikutsertaan hadir dalam peringatan hari besar keagamaan.

3. Pengawasan

Pengawasan yang dilakukan masyarakat secara tidak langsung sedangkan usaha perbaikan dilakukan secara langsung. Pengawasan secara tidak langsung dilakukan oleh oran tua siswa misalnya membantu mengingatkan waktu sekolah dan waktu bermain bagi siswa, adanya pekerja rumah (PR) atau tidak, ke sekolah dan lain sebagainya. Untuk usaha perbaikan baik dalam segi fisik maupun nonfisik madrasah, masyarakat sekitar membantu ikut serta dalam gotong royong pembangunan mesjid, membuat pagar atau penghalang antara madrasah dengan kebun warga atau perumahan warga.

C. Kontribusi Manajemen Berbasis Sekolah dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat di MTs Al Faaizun Watang Palakka Kec. Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone

Peran Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di MTs Al Faizun Watang Palakka salah satunya dalam bentuk kontribusi/manfaat yang dapat diperoleh dari implementasinya. Kontribusi Manajemen Berbasis Madrasah (MBS) dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di MTs Al Faizun Watang Palakka yaitu dengan terlaksananya manajemen berbasis sekolah/madrasah yang baik dalam hal upaya desentralisasi tugas dan tanggung jawab ke madrasah dari pemerintah pusat, fleksibilitas terhadap perubahan yang ada, kemandirian dalam pengelolaan madrasah karena madrasah ini didirikan oleh Yayasan Pendidikan Islam (YPI) dengan keterlibatan masyarakat, serta inisiatif dari sumber daya manusia yang senantiasa bekerjasama untuk kemajuan madrasah. Berdasarkan hal-hal tersebut, sehingga meningkatnya partisipasi masyarakat baik dalam pengambilan keputusan, dalam bentuk ide/gagasan, pelaksanaan dalam bentuk ikut serta kegiatan, serta penilaian dalam bentuk pengawasan dan perbaikan kegiatan madrasah. Hal ini terjadi karena adanya pemahaman bahwa madrasah ini merupakan milik dari masyarakat setempat.

KESIMPULAN

1. Pelaksanaan Manajemen Berbasis Madrasah (MBS) di MTs Al Faaizun Watang Palakka telah dilakukan dengan baik, dapat dilihat dari dimensi fleksibilitas yaitu guru menentukan metode, sumber dan alat belajar sesuai kebutuhan siswa, serta program madrasah sesuai kebutuhan madrasah. Desentralisasi dalam pengelolaan madrasah, aktivitas pengajaran, pemecahan masalah secepat mungkin, strategi pencapaian tujuan, dan pertanggungjawaban kepada pihak yang berwenang. Mandiri dalam pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dana. Serta dimensi inisiatif sumber daya manusia dalam peningkatan kerjasama, menghargai pendapat, dan peningkatan kemampuan melalui pelatihan-pelatihan.
2. Partisipasi masyarakat di MTs Al Faaizun Watang Palakka telah berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yaitu keikutsertaan masyarakat dalam rapat mencapai 70-80%, serta pemberian ide/pendapat, pelaksanaan kegiatan seperti kegiatan perayaan hari nasional dan keagamaan serta pentas seni, melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan, serta bentuk partisipasi masyarakat dalam bentuk dana, tenaga, dan materiil, serta ikut serta dalam pengawasan dan perbaikan kegiatan yang ada di madrasah.
3. Manajemen Berbasis Madrasah (MBS) telah berkontribusi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di MTs Al Faaizun Watang Palakka, seperti meningkatkan kesadaran masyarakat untuk ikut serta baik dari perencanaan (ikut serta dalam rapat, dana, pemberian ide/gagasan), pelaksanaan (ikut serta dalam program madrasah dalam bentuk dana, tenaga, dan bahan/materil) dan evaluasi program pendidikan (pengawasan dan perbaikan).

DAFTAR PUSTAKA

- Barlian, Ikbal. (2013). *Manajemen Berbasis Sekolah Menuju Sekolah Berprestasi*. Jakarta: Erlangga.
- Danim, Sudarman. (2010). *Otonomi Manajemen Sekolah*. Cet. I; Bandung: Al Fabela.
- Departemen Agama RI. (2009) *Al-Qur'an dan Tafsirnya: Edisi yang Disempurnakan*. Cet. III; Jakarta: Departemen Agama RI.
- Haryanto, Agus. (2008). *Komite Sekolah: Sejarah dan Prospeknya di Masa Depan*. Cet. I; Yogyakarta: Hikayat Publishing.
- Hasbullah. (2006). *Otonomi Pendidikan*. Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Minarti, Sri. (2012). *Manajemen Sekolah: Mengelola Lembaga Pendidikan Secara Mandiri*. Cet. II; Jogjakarta [Yogyakarta]: Ar Ruz Media.
- Mukhtar dan Iskandar. (2009). *Orientasi Baru Supervisi Pendidikan*. Cet. I; Jakarta: Gaung Persada.
- Mulyasa. (2009). *Menjadi Kepala Sekolah Profesional*. Cet. X; Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nata, Abuddin. (2010). *Tafsir Ayat-Ayat Pendidikan :Tafsir Ayat-Ayat Al-Tarbawiy*. Cet. IV; Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Pantjastuti, Sri Renani, dkk., (2008). *Komite Sekolah: Sejarah dan Prospeknya di Masa Depan*. Cet. I; Yogyakarta: Hikayat Publishing.

- Republik Indonesia. *Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional: UU RI No. 20 Tahun 2003*. Cet. VI; Jakarta: Redaksi Sinar Grafika, 2014.
- Rohiat. *Manajemen Sekolah*. (2012). Cet. IV; Bandung: Refika Aditama.
- Shihab, M. Quraish. (2002). *Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*. Cet. II; Jakarta: Lentera Hati,
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi*. Cet. I; Bandung: Alfabeta.
- Sujanta, Bedjo. (2007). *Manajemen Berbasis Sekolah: Model Pengelolaan Sekolah di Era Otonomi Sekolah*. Cet. I; Jakarta: Sagung Seto.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. (2005). *Metode Penelitian Pendidikan*. Cet. I; Bandung: Remaja Rosdakarya,
- Sulistiyorini. (2009). *Manajemen Pendidikan Islam: Konsep, Strategi dan Aplikasi*. Cet. I; Yogyakarta: Sukses Offset.
- Syaifuddin, Muhammad, dkk. (2008) *Manajemen Berbasis Sekolah*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional.